

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan dibutuhkan dalam menyusun sebuah rencana kerja. Rencana kerja merupakan hasil dari proses perencanaan berupa daftar keputusan tentang langkah tindakan yang akan datang terkait kegiatan, siapa, dimana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan dipakai, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukur, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan untuk manajemen serta untuk pedoman pengarah kegiatan dan juga sebagai titik awal untuk proses pengendalian (Putra & Pratama, 2017).

Rencana kerja juga dibutuhkan dalam bidang pemerintahan. Rencana kerja dalam bidang pemerintahan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan nasional periode 1 (satu) tahun dan didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi makro termasuk didalamnya, adalah Kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (Tjandra & Sh, 2006)

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) adalah rencana 1 Tahun yang disusun oleh badan yang bertanggung jawab yaitu Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANG) dan sedang dalam proses penyusunannya mengacu pada PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) yang dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya yang diintegrasikan ke dalam prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi (Maramis, Nayaon, & Waworundeng, 2021)

Bappeda artinya badan pemerintah yang bertugas untuk merencanakan pembangunan yang ada di daerah. Bappeda berfungsi merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah serta pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Untuk menunjang pelayanan pada pemerintahan daerah tersebut diperlukan pengelolaan persediaan yang baik. Pengelolaan persediaan tidak terlepas dari risiko hilang serta ketidaksesuaian antara fisik dengan catatan. Perlu adanya penerapan sistem akuntansi persediaan yang efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar persediaan dapat dikelola dengan baik untuk menunjang aktivitas pemerintahan (Afandie, 2017)

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menentukan kualitas (nilai dan makna) sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk mengambil keputusan (Arifin, 2009).

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Hasil Kerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan, penulis mencoba untuk melihat dan membahas masalah sebagai berikut:

Bagaimana hasil evaluasi kerja dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2021 pada badan perencanaan pembangunan kota tangerang.

## 1.3 Tujuan Magang

Untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi kerja dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2021 pada badan perencanaan pembangunan kota Tangerang

## 1.4 Manfaat Magang

1. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa pada keterampilan praktik lapangan.
2. Menambah pengetahuan dan informasi tentang evaluasi kerja dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2021 pada badan perencanaan pembangunan kota tangerang.

## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang ini penulis melakukan magang pada kantor Bappeda kota tangerang dan menjalankan kegiatan magang selama 40 hari kerja.

## 1.6 Metode Magang

1. Observasi

Observasi, dengan mengadakan pengamatan langsung mengenai kondisi dan kegiatan yang ada di lokasi magang.

## 2. Studi pustaka

Yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks serta bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis, dan data yang relevan .

### 1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Dari perumusan masalah, penulis memandang bahwa untuk menghindari kesalahan dan dalam pencarian solusi pada permasalahan apa saja di dalam kegiatan penyelenggaraan terhadap hasil evaluasi kerja dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2021 pada badan perencanaan pembangunan kota tangerang. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui secara rinci terhadap hasil evaluasi kerja dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2021 pada badan perencanaan pembangunan kota tangerang.

### 1.8 Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari delapan (8) sub bab yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan, sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini membahas mengenai pengertian,tujuan,tahapan dan pembahasan mengenai evaluasi hasil kerja pelaksanaan rencana kerja

pemerintah daerah tahun anggaran 2021 pada badan perencanaan pembangunan kota tangerang.

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Merupakan profil lembaga yang meliputi latar belakang dari Bappeda kota tangerang tujuan, lokasi, status dan struktur organisasi.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pengertian lebih lanjut mengenai judul yang didapatkan dari magang mengenai “evaluasi hasil kerja pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2021 pada badan perencanaan pembangunan kota tangerang.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab akhir ini berisikan tentang kesimpulan yang didapat dari analisis dari masalah dan saran yang dianggap perlu untuk perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan mendatang.

